



PENGARUH INKLUSI KEUANGAN PADA ERA DIGITAL ECONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Hastina Febriaty¹, Sri Endang Rahayu², Eri Yanti Nasution³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
hastinafebriaty@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial inclusion in the digital economy era on Indonesia's economic growth and to produce financial inclusion strategies and policies in addressing income inequality in Indonesia. This goal is based on the existence of high financial inclusion and high economic growth that has not been able to overcome income inequality that occurs in people in Indonesia. This type of research is the descriptive statistical method. The types and sources of data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics, Bank Indonesia, books, journals and other sources. The results of this study indicate that partially the effect of financial inclusion such as the number of credit accounts, the number of savings accounts (DPK) and the number of MSME loans has no significant effect on economic growth while the number of ATM machines has a significant effect on economic growth and the amount of JTAB savings has a positive and significant effect on economic growth. economic growth while simultaneously (together) the JATM, JKB, JRK, JTAB and UMKM variables affect economic growth in Indonesia.

Keywords: *Financial Inclusion, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia telah mengalami salah satu permasalahan serius yaitu masalah ketimpangan pendapatan. World Development Report 2006, pada sembilan tahun yang lalu sudah memperkirakan kemungkinan akan adanya distribusi pendapatan yang memburuk yang tidak hanya terjadi di negara-negara Asia melainkan juga akan terjadi dinegara-negara industri. Dalam menyelesaikan krisis dengan cara di bailoutnya sektor keuangan dan disertai juga meningkatnya kebangkrutan yang terjadi di sektor riil turut memburuk pula distribusi pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Seorang pemenang nobel ekonomi yang bernama Joseph Stiglitz, telah melihat perlunya koreksi terhadap ketimpangan pendapatan dalam menerapkan solusi secara fundamental dalam menanggapi berbagai krisis ekonomi dunia yang telah terjadi.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, Secara spasial struktur perekonomian Indonesia masih dihadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto tertinggi disumbang oleh Pulau Jawa sebesar 58,48 persen. Pertumbuhan ekonomi selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera mencapai 21,58 persen.(katadata, n.d.)

DKI Jakarta yang masih menjadi ibu kota hingga saat ini masuk daftar provinsi yang masih punya ketimpangan ekonomi. Gini Ratio yang tercatat di DKI Jakarta mencapai 0,394 pada Maret 2019. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan September 2018.



Tabel 1. Provinsi Indonesia Dengan Ketimpangan Tertinggi

| Provinsi Indonesia dengan ketimpangan tertinggi | Gini Ratio Maret 2019 | Gini Ratio September 2018 |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| DI Yogyakarta | 0,423 | 0,422 |
| Gorontalo | 0,407 | 0,417 |
| Jawa Barat | 0,402 | 0,405 |
| Sulawesi Tenggara | 0,399 | 0,392 |
| DKI Jakarta | 0,394 | 0,390 |
| Papua | 0,394 | 0,398 |
| Sulawesi Selatan | 0,389 | 0,388 |
| Papua Barat | 0,386 | 0,391 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

DKI Jakarta berada di peringkat kelima dengan Gini Ratio tertinggi setelah DI Yogyakarta (peringkat pertama), Gorontalo (peringkat kedua), Jawa Barat (peringkat ketiga), dan Sulawesi Tenggara (peringkat keempat). Sementara di bawah DKI Jakarta ada Papua, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Inklusi keuangan saat ini telah menjadi pertanyaan terkait dengan isu panas tentang kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebab inklusi keuangan sudah terlihat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan, dan untuk mengatasi ketimpangan atau kesenjangan yang secara signifikan meningkat di seluruh dunia. Tumbuhnya kesadaran bahwa pertumbuhan yang timpang memiliki batasan dan tidak berkelanjutan, karena terbatasnya permintaan agregat. Konsekuensi sosial akan terjadi jika ketidaksetaraan tidak dapat ditoleris, hal yang paling buruk yang akan terjadi yaitu kerusuhan sosial, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Inklusi keuangan merupakan akses universal, untuk berbagai layanan keuangan dengan biaya yang wajar. walaupun demikian, secara luas definisi dari inklusi keuangan juga menimbulkan beberapa risiko. Dalam hal ini contohnya karena bank, walaupun bank tersebut bukan satu-satunya aktor lembaga keuangan untuk inklusi keuangan, tetapi bank tersebut bisa saja ditekan untuk menyediakan kredit mikro bagi usaha-usaha kecil dan untuk orang menengah kebawah oleh pemerintah negara mereka. Lembaga keuangan berperan penting dalam memfasilitator berbagai macam akses keuangan untuk kepentingan semua kelompok pendapatan dalam masyarakat.

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi pentingnya sinergi antara strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi untuk menanggulangi ketimpangan secara lebih luas. Khususnya bagi negara berkembang, mengatasi ketimpangan ekonomi tak cukup dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada kinerja industri nasional. Sebab, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kerap tidak berkualitas. Karena itu, bagi negara-negara berkembang, ketimpangan ekonomi juga perlu diatasi dengan sistem keuangan yang inklusif. Layanan keuangan inklusif membantu kelompok rentan dan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka, mendapatkan modal, mengelola risiko, dan pada akhirnya bisa membawa keluar dari kemiskinan. Untuk konteks Indonesia, sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan, meski masih perlu upaya lebih transformatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antardaerah pada akhirnya merupakan akibat dari sebuah proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu negara atau provinsi. Dari



masalah ketimpangan ekonomi tersebut, kemudian memunculkan berbagai permasalahan lainnya, diantaranya adalah adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antardaerah karena salah satu penunjang dari pelaksanaan pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya fasilitas infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, di mana pada daerah yang perkembangan ekonominya tertinggal ternyata memiliki ketersediaan sarana infrastruktur yang sedikit atau bahkan tidak ada. Selain hal tersebut di atas, masalah ketimpangan pada dasarnya disebabkan oleh masalah perbedaan pada kepemilikan sumberdaya ekonomi dan juga kondisi demografi. Sebagaimana diuraikan oleh (Syafrizal, 2008) dalam jurnal (Suharto, 2013) menjelaskan mengenai faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah sebagai berikut: “Faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam, adanya perbedaan kondisi geografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antarwilayah”.

Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Suharto, 2013)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Sedangkan menurut (Todaro, 2006) Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun tahun sebelumnya.

Inklusi Keuangan

Dalam perkembangannya, upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Hal ini didukung oleh beberapa definisi inklusi keuangan dari berbagai sumber. (Sarma, 2008) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai anggota ekonomi.

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan antara lain: Penambahan jaringan kantor; 1. Penambahan jumlah agen; 2. Penambahan jumlah ATM; 3. Penambahan *point of access* melalui layanan digital; 4. Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (branchless); 5. Penambahan kerja sama dengan pihak lain; dan 6. Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan. 7. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja yang dinamakan *Index Financial Inclusion* (IFI). IFI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*), dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan (Sumber: Bank Indonesia).

Dimensi Akses

Dimensi akses merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan keuangan (kantor bank, ATM, dll). Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi:

- a. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Kantor Layanan Bank (bulan t)}}{\text{Total Penduduk Dewasa (tahun t)}} \times 100.000$$

- b. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total ATM (bulan t)}}{\text{Total Penduduk Dewasa (tahun t)}} \times 100.000$$

- c. Jumlah kantor bank per 1.000 km² dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Kantor Layanan Bank (bulan t)}}{\text{Luas Wilayah (tahun t)}} \times 1.000$$

- d. Jumlah ATM per 1.000 km² dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total ATM (bulan t)}}{\text{Luas Wilayah (tahun t)}} \times 1.000$$

Dimensi Penggunaan

Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi:

- a. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Rekening DPK Perbankan (bulan t)}}{\text{Total Penduduk Dewasa (tahun t)}} \times 1000$$

- b. Persentase total simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga terhadap Produk Domestik Bruto (DPK/PDB) yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total DPK (bulan t)}}{\text{Total PDB (tahun t)}} \times 100$$

- c. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Rekening Kredit Perbankan (bulan t)}}{\text{Total Penduduk Dewasa (tahun t)}} \times 1.000$$

- d. Persentase total kredit terhadap Produk Domestik Bruto (Kredit/PDB) yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Kredit (bulan t)}}{\text{Total PDB (tahun t)}} \times 100$$

Dimensi Kualitas

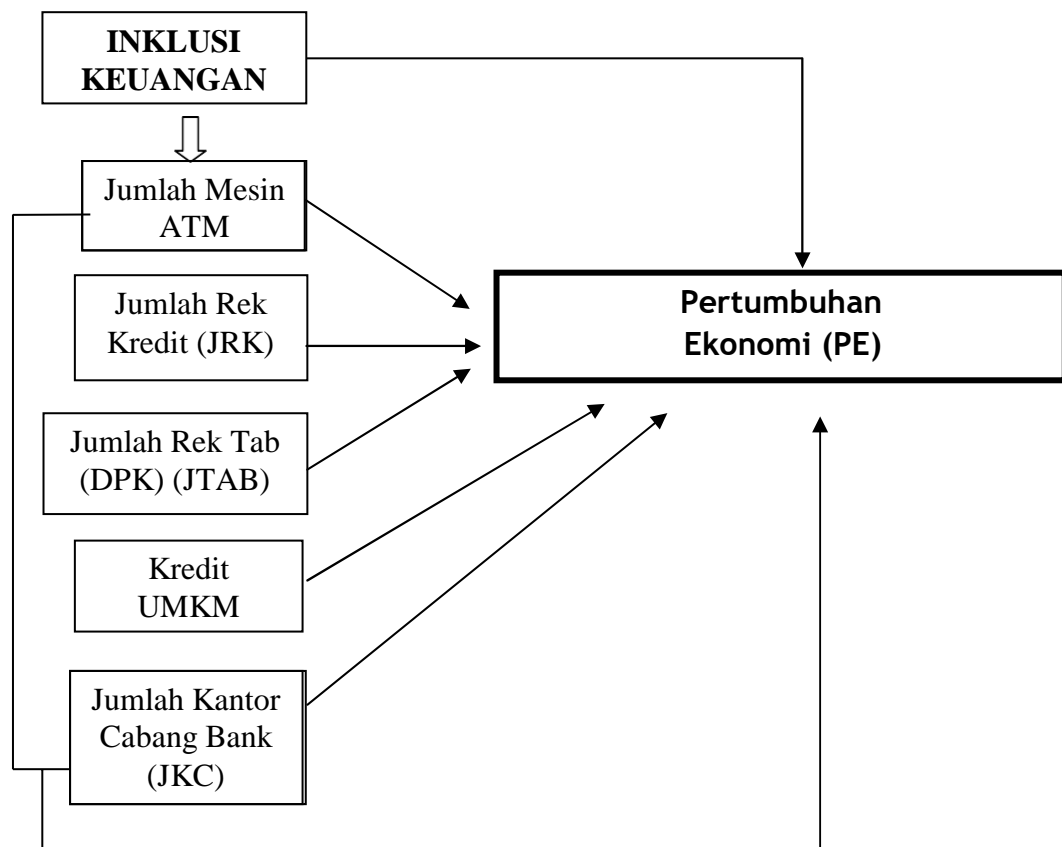
Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sulit untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan inklusi keuangan sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang digunakan.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa judul penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai inklusi keuangan dan ketimpangan di Indonesia yaitu: (Ummah et al., 2018) dengan judul Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah Inklusi keuangan memiliki hubungan searah dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi pendapatan di suatu daerah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut, tetapi tidak sebaliknya. (Purba, 2016) dengan judul penelitiannya . Hasil penelitiannya adalah jumlah kantor bank, jumlah rekening kredit dan jumlah ATM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Sedangkan menurut (Anwar & Amri, 2017) dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh inklusi keuangan terhadap PDB Indonesia memiliki Hasil penelitian bahwa variabel inklusi keuangan yang seperti jumlah kantor bank, jumlah ATM, dan jumlah rekening kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (time series) dari periode TW;1:2005 – TW;4:2019. Data diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas data indeks inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang diukur melalui rasio gini serta juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, situs internet, dan lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono,2008) Penelitian ini menggunakan model teknik analisis data regresi linear berganda. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RE_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 JATM_t + \alpha_2 JJK_t + \alpha_3 JTAB_t + \alpha_4 KUMKM_t + \alpha_5 JKB_t + e_t \quad \dots(1)$$

dimana:



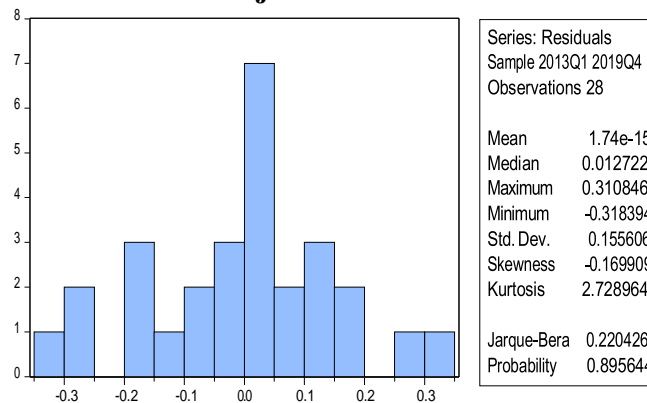
- PE_t = Pertumbuhan ekonomi tahun t (persen)
 $JATM_t$ = jumlah mesin ATM / 100000 penduduk dewasa tahun t (unit)
 JRK_t = Jumlah Rekening kredit (kredit yang disalurkan)/ 100000 penduduk dewasa tahun t (rekening/account)
 $JTab_t$ =Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia tahun t (rekening/account)
 JKB_t = Jumlah Kantor layanan Bank di Indonesia/100000 penduduk tahun (unit)
 $KUMKM_t$ = Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan tahun t (persen)
 e_t, U_t = error term

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas



Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar 0,895644 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3
Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1.714953 | Prob. F(5,22) | 0.1730 |
| Obs*R-squared | 7.852667 | Prob. Chi-Square(5) | 0.1645 |
| Scaled explained SS | 4.190854 | Prob. Chi-Square(5) | 0.5223 |

Sumber: Data diolah

Pada persamaan pertumbuhan ekonomi, hasil uji heterokedastisitas dengan uji breusch-pagan didapatkan hasil prob < chi sebesar 0,1645 lebih besar dari signifikansi yaitu 0,05. Itu berarti pada persamaan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.



Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai variance inflation (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai tolerance $< 0,10$ atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 12/24/20 Time: 19:58
Sample: 2013Q1 2019Q4
Included observations: 28

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C | 3.962889 | 3734.016 | NA |
| JATM | 6.84E-05 | 164.8188 | 2.536876 |
| JKB | 0.000276 | 70.47596 | 1.135156 |
| JRK | 9.02E-05 | 4237.110 | 3.280337 |
| JTAB | 5.17E-08 | 67.15657 | 4.350901 |
| UMKM | 0.081209 | 3581.093 | 1.873027 |

Sumber: Data diolah

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk seluruh variabel independen tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kelima variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.492995 | Prob. F(2,20) | 0.6180 |
| Obs*R-squared | 1.315532 | Prob. Chi-Square(2) | 0.5180 |

Sumber: Data diolah

Nilai prob sebesar 0,5180 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel



terikat

Tabel 6
One Way Anova
(Hasil Regresi)

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares



Date: 12/24/20 Time: 19:51
Sample: 2013Q1 2019Q4
Included observations: 28

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 10.42788 | 1.990701 | 5.238294 | 0.0000 |
| JATM | -0.036346 | 0.008271 | -4.394649 | 0.0002 |
| JKB | -0.003852 | 0.016621 | -0.231767 | 0.8189 |
| JRK | -0.012381 | 0.009495 | -1.303981 | 0.2057 |
| JTAB | 0.000705 | 0.000227 | 3.100293 | 0.0052 |
| UMKM | -0.216556 | 0.284971 | -0.759920 | 0.4554 |
| R-squared | 0.591719 | Mean dependent var | 5.096429 | |
| Adjusted R-squared | 0.498928 | S.D. dependent var | 0.243527 | |
| S.E. of regression | 0.172384 | Akaike info criterion | -0.490775 | |
| Sum squared resid | 0.653757 | Schwarz criterion | -0.205303 | |
| Log likelihood | 12.87085 | Hannan-Quinn criter. | -0.403504 | |
| F-statistic | 6.376890 | Durbin-Watson stat | 1.670061 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000839 | | | |

Sumber: Data diolah

Analisis Regresi

Interpretasi hasil

Dari hasil regresi tersebut maka diperoleh persamaan regresi dan akan dianalisis sebagai berikut:

$$PE = 10.42788 - 0.036346JATM - 0.003852JKB - 0.012381JRK + 0.000705JTAB - 0.216556UMKM + \mu$$

Uji t

Pada persamaan diatas nilai konstanta sebesar 10.42788. Hal ini berarti apabila semua variabel bernilai 0, maka pertumbuhan ekonomi akan bernilai sebesar 10.42788. Variabel jumlah atm (JATM) bernilai negatif dan signifikan yang artinya setiap kenaikan 1 unit jumlah atm (JATM) akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,036% dengan asumsi variabel lain konstan, maka H1 diterima. Variabel jumlah kantor bank (JKB) bernilai negatif dan tidak signifikan yang artinya setiap kenaikan 1 unit jumlah kantor bank (JKB) akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,003% dengan asumsi variabel lain konstan, maka H2 ditolak. Variabel jumlah rekening kredit (JRK) bernilai negatif dan tidak signifikan yang artinya setiap kenaikan 1 rekening maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,012% dengan asumsi variabel lain konstan, maka H3 ditolak. Variabel jumlah tabungan/DPK (JTAB) bernilai positif dan signifikan yang artinya setiap kenaikan 1 nasabah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0007% dengan asumsi variabel lain konstan, maka H4 diterima dan kredit UMKM bernilai negatif dan tidak signifikan artinya setiap kenaikan 1% kredit UMKM akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,216% dengan asumsi variabel lain konstan maka H5 ditolak.

Uji F

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 8 di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0.000839 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model



regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Itu artinya hipotesis (H₆) Diterima.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Nilai R-Square pada tabel 6 di atas besarnya 0.591719 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel JATM, JKB, JRK, JTAB dan UMKM berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 59,17 %. Artinya variabel JATM, JKB, JRK, JTAB dan UMKM memiliki proporsi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 59,17% sedangkan sisanya 40,83% (100% - 59,17%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

Diskusi

a. Pengaruh jumlah ATM terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan jumlah mesin ATM mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketika jumlah mesin ATM bertambah 1 unit, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,036 persen. Penyebab selanjutnya adalah dimensi ketersediaan di Indonesia mengenai layanan perbankan yang masih terbatas di perkotaan, sehingga inklusivitas keuangan belum secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ang (2010) yang menyatakan bahwa pengembangan keuangan di India dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut karena semakin intensifnya distribusi cabang bank yang semakin menyeluruh yang diluncurkan oleh pemerintah India selama periode 1977-1990, sehingga dapat signifikan meningkatkan akses kaum miskin ke sektor keuangan formal. Sedangkan yang terjadi di Indonesia menurut data (OJK, 2017) menunjukkan bahwa persebaran ATM dan kantor cabang di Indonesia belum merata. Baik kantor cabang maupun ATM di Indonesia belum sepenuhnya dapat menyentuh ke pelosok karena sebesar 65% untuk ATM dan 51% kantor cabang masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Ditambah lagi dengan data (Bank Indonesia, 2014) menyatakan bahwa sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 % tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal baik berupa kantor cabang maupun ATM. Padahal dari sekitar 12,49% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64% tinggal di daerah perdesaan.

sebuah bank yang mampu mempengaruhi performa suatu bank. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga bagi sebuah bank akan meningkatkan output dari sektor finansial Indonesia. Sektor finansial yang baik akan berdampak pada perekonomian makro dan stabilitas finansial Indonesia. Masyarakat sebagai pemilik rekening dana pihak ketiga akan memperoleh bunga atau balas jasa dari uang yang telah digunakan oleh pihak perbankan. Dimana pihak bank akan menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk memutar uang. Perputaran uang ini akan meningkatkan kondisi multiplier uang di dalam perekonomian suatu negara. (Anwar & Amri, 2017) menyatakan jumlah rekening kredit memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian. Dimana semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Pengaruh Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan kredit UMKM mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketika kredit UMKM naik sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,209 persen. Menurut OJK (2015) dalam bukunya berjudul Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah tidak menunjukkan tanda hubungan yang stabil antara kredit sektor prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.



Hubungan dapat bersifat positif/negatif di beberapa periode, tetapi dapat berubah negatif/positif pada periode lainnya. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa saat terjadi hubungan positif antara kredit dan pertumbuhan ekonomi (tanpa mempertimbangkan efek kapan terjadinya hubungan positif tersebut), maka terlihat bahwa kredit kepada 5 sektor prioritas (pertanian, perikanan, konstruksi, pertambangan dan industri pengolahan) memberikan sumbangan informasi yang relatif signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, baik perubahan yang sifatnya naik atau turun. Dengan mempertimbangkan faktor kredit semata yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tentu belum dapat memberikan gambaran utuh akan kondisi/perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah.

KESIMPULAN

Hasil regresi/estimasi menunjukkan bahwa pengaruh infrastruktur jalan dan defisit listrik sebesar 59,17 %. Artinya variabel JATM, JKB, JRK, JTAB dan UMKM memiliki proporsi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 59,17% sedangkan sisanya 40,83% (100%

- 59,17%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

Secara Simultan (bersama-sama) variabel JATM, JKB, JRK, JTAB dan UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara parsial, Variabel JATM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel JKB, JRK, dan UMKM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta JTAB berpengaruh positif dan Signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saran yang penulis berikan yaitu perlu adanya intervensi dari stakeholder atau pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan kepada golongan masyarakat menengah kebawah dengan cara menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat miskin. Jika lapangan pekerjaan yang tersedia jauh lebih banyak untuk golongan masyarakat menengah keatas yang memiliki pendidikan tinggi, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah, dan tentunya akan mengakibatkan melebarnya kesenjangan dalam ketimpangan pendapatan, itulah mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Amri. (2017). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3), 454–462. <https://doi.org/10.1111/cup>.
- Bank Indonesia. (2014). *Keuangan Inklusif di Indonesia*. [Www.Bi.Go.Id](http://www.Bi.Go.Id).
- Beck T, Demirguc-Kunt A, P. M. (2006). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Country. *Journal of Financial Economics*.
- Efendi, B. (2019). Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *JEpa*, 4(2), 72-78.
- Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/261720>
- Gujarati, D. N. (2006). *Econometria Básica*. In *Basic Econometrics*.
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *E- Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*.
- Novalina, A. (2019). Leading Indicator Stabilitas Ekonomi Di Negara Civi (China, India, Vietnam Dan Indonesia) Pendekatan Panel ARDL. *JEpa*, 4(1), 1-12.
- OJK. (2017). OJK: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. *Ojk*. Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Beta Offset.



- Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion (p. 3). *Indian Council for Research on International Economic Relations*.
- Suhartini, A. M., & Yuta, R. (2015). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Suharto, U. S. (2013). *ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN (PERIODE TAHUN 2002-2011)*.
- Todaro, M. P. dan S. C. S. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. In *embangunan Ketiga, Ekonomi di Dunia* (Edisi ke 8). Erlangga.
- Todaro, M. P. dan S. C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (H. M. dan Puji & A.L. (eds.); Kesembilan). Erlangga.
- Widarjono, A. (2016). Penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Analisis kausalitas. *Economic Journal of Emerging Markets.worldbank*. (2016). *Trends in the Objectives of National Financial Capability Strategies (p.9)*.
- www.bps.go.id. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto, Lapangan Usaha*.
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>